

**BAB IV**

**PEMBAHASAN STRATEGI SOSIALISASI HUMAS KPU PROVINSI  
JAWA TENGAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI  
PEMILIH PILGUB JATENG 2018**

Pada bab ini akan dibahas hasil temuan penelitian yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya. Dalam bab ini peneliti akan menganalisis hasil temuan penelitian mengenai Strategi Sosialisasi Humas KPU Provinsi Jawa Tengah Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pilgub Jateng 2018 dengan menggunakan teori – teori yang sudah ada.

**4.1 Analisis Strategi Sosialisasi Humas KPU Provinsi Jawa Tengah Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilgu Jateng 2018**

Menurut Scott M. Cutlip and Allen H. Centre , dalam **Ruslan (2008:25)** mengungkapkan bahwa Public relations adalah fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan tata cara merencanakan suatu program kegiatan dan komunikasi untuk memperoleh pengertian dan dukungan publiknya.

Hal ini yang dilakukan oleh Humas KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Tengah. Adanya pelaksanaan Pilgub membuat KPU Provinsi Jawa Tengah harus melakukan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat Jawa Tengah mengetahui adanya pelaksanaan Pilgub Jateng 2018. Sosialisasi ini

diharapkan masyarakat lebih sadar dan peduli untuk turut serta mendukung pelaksanaan Pilgub Jateng 2018 dengan memberikan hak suaranya ke TPS, dengan begitu jumlah partisipasi Pilgub Jateng 2018 dapat meningkat. Berhasil atau tidaknya suatu kegiatan sosialisasi secara efektif juga banyak ditentukan oleh strategi sosialisasi yang digunakan dalam beberapa kasus.

Menurut Adnanputra (**Ruslan, 2003:109**), Strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (*plan*), sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan (*planning*), yang pada akhirnya perencanaan adalah suatu fungsi dari proses manajemen. Strategi pada hakikatnya merupakan suatu perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik operasionalnya. Komunikasi secara efektif dan strategis pada prinsipnya adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana mengubah sikap (*how to change the attitude*).
- b. Mengubah opini (*to change the opinion*).
- c. Mengubah perilaku (*to change behavior*).

Strategi ini pula yang dilakukan oleh Humas KPU Provinsi Jawa Tengah dalam menangani masalah ketidakhadiran masyarakat dalam Pemilu maupun Pilkada di Jawa Tengah. Ada lima indikator yang perlu diperhatikan dalam melakukan strategi sosialisasi Humas pada **Cutlip (2006 : 320) :**

#### 4.1.1 Penemuan Masalah (*fact finding*)

Pada tahap penemuan masalah atau *fact finding* merupakan proses tahap pertama untuk menentukan langkah – langkah atau tindakan untuk tahap selanjutnya. Langkah identifikasi masalah ini memberi landasan bagi semua

proses pemecah masalah dengan menentukan “Apa yang terjadi saat ini” (**Cutlip 2006 : 320**). KPU Provinsi Jawa Tengah dalam mencari permasalahan apa yang terjadi tidak melakukan proses *fact finding* secara khusus seperti yang dibentuk organisasi maupun perusahaan lain, dalam artian melakukan penelitian secara langsung melalui kuesioner atau dengan metode lain, namun yang dilakukan KPU Jateng hanya sebatas melakukan identifikasi, pengamatan dan melakukan kajian terbatas dengan melibatkan beberapa pihak yaitu KPU Kab/Kota melalui catatan ketidakhadiran pemilih sebuah inovasi dari KPU sendiri untuk mengetahui alasan seseorang tidak hadir saat Pemilihan berlangsung, Jaringan Pemantau Pemilih Rakyat (JPPR) dan Dosen dari beberapa Universitas.

Berdasarkan hasil pengidentifikasian dan pengamatan tersebut, KPU Provinsi Jawa Tengah mengetahui adanya berbagai ancaman yang muncul dalam menyelenggarakan Pilgub Jateng 2018 seperti rendahnya partisipasi masyarakat Jawa Tengah terhadap Pemilu maupun Pilkada yang disebabkan minimnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, kurangnya pengetahuan akan pendidikan pemilih dan politik, dan ketidakpercayaan kepada lembaga – lembaga politik. Untuk itu sangatlah penting pengamatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah mengenai kebutuhan apa saja yang nantinya diperlukan Pilgub Jateng 2018 mendatang agar jumlah ketidakhadiran masyarakat ke TPS berkurang, karena Tugas Humas KPU Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan Pilkada salah satunya adalah meningkatkan partisipasi pemilih.

Menurut John E. Marston dalam **Nurjaman dan khairul umam (2012 : 100-105)** mengatakan *public relations* adalah suatu bidang yang memerlukan segi perencanaan yang matang (*planned*), juga “komunisasi” yaitu gabungan antara melakukan komunikasi dan sekaligus membujuk (*persuasive*), dengan tujuan untuk memperkenalkan, meningkatkan kesadaran atau pengertian dan mencari dukungan publik dan sasaran khalayaknya (*target audience*), sekaligus mempengaruhi serta membujuk sasaran khalayaknya yang terkait dan dituju (*significant public*).

Langkah awal untuk melakukan kegiatan sosialisasi sudah dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 Mei 2017 di Agrowisata Kampoeng Kopi Banaran, Bawen Kabupaten Semarang dengan mensosialisasikan Rumah Joglo Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 yang bertujuan mengenalkan lebih awal kepada masyarakat tentang perhelatan Pilgub Jateng yang akan digelar tahun mendatang, tepatnya Rabu 27 Juni 2018. Setelah mendapatkan informasi dari kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat berpartisipasi lebih aktif lagi di setiap tahapan Pilgub Jateng 2018 mulai dari Pemutakhiran Data Pemilih, Kampanye, sampai menggunakan Hak pilihnya pada hari H. Agar masyarakat lebih mengetahui tentang kepemiluan KPU Jateng menyediakan sarana Rumah Pintar Pemilu seperti data sejarah pemilu, penyelenggaraan pemilu, hasil pemilu dan lain – lain, RPP bisa dikunjungi oleh pelajar mulai anak SD sampai Perguruan Tinggi maupun masyarakat umum.

KPU Provinsi Jawa Tengah juga resmi meluncurkan Maskot dan Jingle Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jateng 2018, di Pelataran

Lawang Sewu Semarang Jawa Tengah pada hari Selasa malam 29 Agustus 2017 kepada berbagai lapisan masyarakat dengan meluncurkan maskot tokoh wayang Semar dan slogan “becik tur nyenengke” melengkapi sosialisasi tersebut. Pemilihan Semar sebagai maskot dikarenakan dalam pewayangan Semar menjadi pengasuh dan penasihat para kesatria yang dikenal sangat arif , bijaksana mudah bergaul dengan siapa saja, baik dengan berbagai kalangan, tanggap terhadap perubahan zaman dan jika menemukan ketidakadilan atau tindakan sewenang – wenangnya maka Semar akan tegas melakukan tindakan preventif, persuasif dan represif. KPU Provinsi Jawa Tengah berharap dengan maskot tersebut dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat Jateng, baik kepada pemilih maupun pasangan calon peserta Pilgub Jateng agar dapat memberikan yang terbaik untuk Jateng.

Dua kegiatan awal sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai pembukaan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2018 yang kemudian Humas KPU Jateng akan melakukan perencanaan program kegiatan sosialisasi yang lebih efektif di tahap selanjutnya.

#### 4.1.2 Perencanaan dan Pemograman (*Planning and Programming*)

Tahap *planning and programming* merupakan tahap perencanaan dan menentukan program yang akan dilakukan. Pada tahap ini berdasarkan fakta – fakta yang terkumpul pada tahap penemuan masalah oleh KPU Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk merencanakan strategi, program, tujuan, tindakan, serta bagaimana cara penyampaianya.

Program sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan strategi yang digunakan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilgub Jateng tahun mendatang . KPU dimasing – masing kabupaten dan kota di Jawa Tengah akan mengadakan kegiatan jalan sehat bersama dengan mengajak masyarakat di alun – alun daerah setempat, dimulai serentak pada 8 Oktober 2017 melalui jalan sehat bersama KPU memberikan sosialisasi tentang tahapan Pilgub.

Kemudian berkenaan dengan program pendidikan pemilih KPU Jateng juga mengharapkan kualitas pemilih, terutama pemilih pemula pelajar SMA dengan mengadakan kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah berupa KPU Goes To School dan KPU Goes To Campus untuk pemilih mahasiswa. Untuk masyarakat umum sekitar KPU mengajak kecamatan, kelurahan serta Ketua RT/RW daerah masing – masing setempat untuk mengajak warganya berkumpul dan KPU akan mensosialisasikan secara langsung melalui face to face kepada warga bersama – sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilu dan pilkada.

KPU juga mengembangkan komunitas – komunitas peduli pemilu dan demokrasi dan penyandang disabilitas akan rangkul dan dekati dengan mengagendakan kemudian memfasilitasinya dengan cara membuatkan visi misi calon dalam bentuk brail pada website KPU yang akan menyediakan fitur disability agar mudah diakses oleh mereka. Program selanjutnya KPU akan menyiapkan aplikasi berbasis android yang diberi nama ” SIGUB Jateng”. Aplikasi tersebut berisi informasi seputar Pilgub Jateng 2018. Di antaranya

tahapan, program dan jadwal, anggaran agenda, persyaratan calon, pasangan calon, inspirasi untuk masyarakat, harapan masyarakat, dan lainnya.

Dalam pendidikan pemilih juga tidak sepenuhnya KPU Jateng yang memberikan penyuluhannya, namun yang lebih intensif memberikan pendidikan pemilih yaitu partai politik, Kesbanglinmas atau lembaga – lembaga masyarakat lain secara bersama memberikan suatu kontribusi dalam proses sosialisasi seseorang dan menggunakan hak politiknya untuk berperan dan membentuk sikap dan keyakinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti konsep teori yang dikemukakan oleh **M Linggar Anggoro (2000:3)**. Hal itu seperti apa yang diterapkan oleh KPU Jateng, bahwa salah satu tujuan Humas KPU Jateng adalah melakukan *planning and programming* dalam strategi sosialisasi pada penyelenggaraan Pilgub Jateng 2018.

KPU Provinsi Jawa tengah menargetkan sasaran dari pelaksanaan sosialisasi adalah semua elemen masyarakat, terutama pemilih pemula, perempuan dan penyandang disabilitas karena memang sumbang suara dari mereka itu sangat luar biasa jika KPU berhasil menggandeng mereka. Strategi yang digunakan untuk sosialisasi pilgub Jateng adalah yang mengintegrasikan sikap, berbagai strategi yang meliputi publikasi media, komunikasi tatap muka, dan mobilisasi sosial dengan tidak hanya melibatkan KPU tetapi juga seluruh stakeholder dari KPU seperti Pemerintah Daerah, Partai Politik, LSM, Ormas, Tokoh Agama, Media Massa dan Perguruan Tinggi supaya kegiatan sosialisasi berjalan secara masif dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh **Frank jefkins (2003:9-10)** Humas adalah

semua bentuk komunikasi yang terencana baik itu kedalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayak dalam rangka mencapai tujuan – tujuan spesifik yang berlandasan pada saling pengertian.

### 1.1.3 Aksi dan Komunikasi (Taking Actions and Communication)

Tahap ketiga yaitu *taking actions and communication*, Tahap yang paling penting untuk di implementasikan dari kegiatan perencanaan dan strategi sosialisasi yang telah di rencanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada bab sebelumnya. Untuk mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan, Humas KPU Provinsi Jawa Tengah mempunyai peranan penting untuk mewujudkannya. Sesuai dengan pendapat Bernay, dalam **Soemirat dan Ardianto (2001 : 1) *Public Relations*** mempunyai fungsi yaitu :

- a. Memberikan penerangan kepada masyarakat.
- b. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung.
- c. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan atau lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya.

Pada upaya penyampaian informasi, KPU Provinsi Jawa Tengah sangat memperhatikan khalayaknya yang menjadi sasarannya, karena kebutuhan informasi tiap khalayak berbeda – beda seperti pemilih pemula berbeda dengan pemilih yang bukan pemula. Yang pemula masih terklasifikasi, yang kelompok pelajar dengan mahasiswa tentu berbeda. Kelompok penyandang disabilitas



kebutuhannya materi dan medianya juga pasti berbeda dengan warga negara yang lainnya. Pesan yang khusus sifatnya ditujukan kepada publik tertentu maka penyampaianannya memerlukan media yang khusus pula (*Muslimin, 2004 : 3*).

Proses sosialisasi kali ini didesain dengan konsep gembira atau *fun* untuk menarik perhatian masyarakat. KPU dan Bawaslu atau Panwaslu juga sudah menerobos cara-cara konvensional untuk menyampaikan atau menyosialisasikan pilkada kepada masyarakat. Seperti melalui media sosial, media massa, media luar ruang, pertemuan-pertemuan berbagai kelompok masyarakat, dan *car free day*. Melalui cara tersebut masyarakat dapat mengerti kemudian menggunakan hak konstitusionalnya dan diharapkan semua elemen masyarakat dapat merawat demokrasi yang baik di Jateng. Hal ini juga dapat menghindari masyarakat dari berbagai hal yang sifatnya mengumbar ujaran kebencian, fitnah tidak penting, serta mengorganisasikan diri dalam kelompok “fitnater- fitnater”. Baik pemimpin, partai politik, maupun kandidat harus bisa menjadi contoh bagaimana demokrasi ini berjalan dengan baik. KPU Provinsi Jawa Tengah bersikap persuasif dengan melakukan sosialisasi melalui kebudayaan lokal seperti pagelaran seni wayang, ketoprak dan sasarehan tentang pelaksanaan Pilgub. Pendekatan ini bisa dikatakan berhasil, karena masyarakat lebih antusias dengan kegiatan ini. Sesuai dengan teori yang memaparkan bahwa suatu kegiatan komunikasi tidak hanya bersifat informatif tetapi juga persuasif. Yaitu sebuah usaha untuk mempengaruhi publiknya dengan penjelasan – penjelasan dan ajakan tercapai saling pengertian (*mutual understanding*) dan hubungan timbal balik yang menguntungkan (*reciprocal relations*) (*Setyodarmojo, 2003: 68*).

Dalam cara mengurangi jumlah ketidakhadiran pemilih KPU Provinsi Jawa Tengah juga akan memperketat Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) dengan cara meminta kepastian kepada keluarga dari yang merantau, apabila tidak dapat memberikan hak suaranya akan dicoret namanya walaupun masih punya KTP berdomisili Jateng. Tetapi pemilih tersebut jika ingin menggunakan hak suaranya, maka dapat memberikan suaranya diatas pukul 12 siang dengan cara menunjukan KTP berdomisili Jateng. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi Pilgub Jateng 2018. Seperti pada Pilgub 2013 lalu, dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang meninggal masih terdaftar dan mengikuti Pemilu dikarenakan warga yang meninggal setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan maka nama pemilih tersebut masih harus ditetapkan. Termasuk alih status, Jika saat ini masih terdaftar sebagai anggota TNI tidak boleh terdaftar kemudian pada saat hari Pemilihan sudah menjadi pensiunan , hal itu dapat KTP sesuai domisilinya untuk memberikan suaranya ke TPS. KPU juga akan menetapkan Pilgubnya pada hari rabu supaya masyarakat dapat mengingat bahwa hari rabu adalah hari pemilu.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kurun waktu dekat KPU Jateng akan mengundang semua perangkat kecamatan hingga pengurus RT untuk mensosialisasikan pelaksanaan Pilgub Jateng. Dengan mengadakan kerjasama para RT untuk mengundang semua warga ditiap kampung dan kelurahan untuk mengecek database tiap anggota keluarganya atau dirinya sendiri.

Walaupun KPU Provinsi Jawa Tengah telah menggunakan berbagai macam media dalam melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pilgub Jateng 2018 untuk mencapai keberhasilan sosialisasi, pesan yang disampaikan sedemikian rupa kadang kala dengan menciptakan stimulan (rangsangan) sehingga komunikan merasakan respect terhadap pesan yang ingin disampaikan. Selain itu timing yang tepat juga perlu diperhatikan karena sangat menentukan apakah komunikasi dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran tidak adanya salah pengertian.

Salah satu faktor penting dalam komunikasi Humas menurut Cutlip & Center dalam **Setyodarmojo (2003 : 117)** ialah Clarity yang berarti pesan – pesan itu haruslah mempergunakan kata – kata atau istilah yang sederhana, dengan demikian maksud akan menjadi jelas dan mudah dimengerti. Dalam upaya mensosialisasikan Pilgub Jateng 2018 mengenai ajakan untuk berpartisipasi dengan menggunakan hak suaranya KPU Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan teori diatas yaitu pesan – pesan yang akan ,disampaikan menggunakan kata – kata atau istilah yang sederhana agar mudah dipahami dan dimengerti secara jelas oleh sasaran pada saat melakukan sosialisasi.

#### 4.1 4 Evaluasi (Evaluation)

Tahap terakhir yang dilakukan Humas setelah melakukan semua tahap penemuan masalah, perencanaan dan pelaksanaan strategi sosialisasi kaitannya dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat Jawa Tengah pada Pemilihan Kepala Daerah, selanjutnya adalah tahap evaluasi. Jika dilihat dari pelaksanaan Pilgub Jateng sebelumnya evaluasi yang dilakukan KPU Provinsi

Jawa Tengah dilakukan setiap satu bulan setelah program tersebut dijalankan dan setelah keseluruhan program diselenggarakan sampai pada saat proses perhitungan suara. Hasil evaluasi pada tahun sebelumnya juga dapat dijadikan patokan pelaksanaan sosialisasi Pilgub mendatang, untuk meminimalisir kekurangan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat diperbaiki kedepannya. Tanpa adanya evaluasi KPU Provinsi Jawa Tengah tidak akan mengetahui kekurangan, kendala dan masalah – masalah yang akan dihadapi. Kendala itu adalah regulasi, anggaran, sumber daya manusia atau personel yang terbatas, sikap apatisme masyarakat, partisipasi dan kepercayaan publik serta kondisi geografis dan infrastruktur.

KPU juga berupaya memperbaiki proses di beberapa tahapan, di antaranya proses pemutakhiran data dan daftar pemilih, sosialisasi, pengelolaan dan pembebanan biaya kegiatan KPU Provinsi Jateng maupun kabupaten dan kota. Perbaikan proses dalam pelaksanaan Pilgub tahun 2018 juga akan memperbaiki proses penganggaran yang mampu melakukan efisiensi hingga 182 miliar. Pemprov Jateng telah menyediakan dana sejumlah Rp 992.241.792.000, dana tersebut akan di gunakan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dan belanja operasional selama proses pilgub Jateng 2018.

Evaluasi dilakukan setelah Pilgub dilaksanakan dengan cara mengetahui kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilgub. Menurut **Morissan dalam bukunya *Manajemen Public Relations* (2008:225)** mengatakan bahwa evaluasi yang signifikan terhadap suatu program kehumasan haruslah dilakukan berdasarkan pengukuran secara ilmiah mengenai kesadaran atau

perubahan pendapat, sikap, dan tingkah laku khalayak mengenai organisasi atau perusahaan. Tetapi keberhasilan sosialisasi tidak dapat diukur dan dibandingkan dengan keberhasilan dan tingkat presentasi hasil suara yang dihitung, karena tingkat presentase suara mutlak berhasil berapapun jumlah pemilih yang hadir. Menurut Humas KPU Provinsi Jawa Tengah tingkat keberhasilan Pilkada tidak diukur dengan tingkat kehadiran dan jumlah pemilih. Walaupun tingkat kehadirannya hanya satu orang atau lebih tetapi suara dianggap sah maka dikatakan berhasil. Namun kegiatan sosialisasinya dianggap kurang berhasil karena sosialisasi diukur dari banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkada. Evaluasi sosialisasi dilakukan oleh pihak – pihak internal KPU Provinsi Jawa Tengah saja.

Hal – hal yang dievaluasi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi adalah apakah program Goes to School sudah mampu menarik pemahaman pelajar SMA serta kepedulian mereka terhadap lingkungannya, Goes to campus pada mahasiswa apakah berhasil membuat para mahasiswa mempunyai jiwa demokrasi, Apakah penyandang disabilitas sudah merasa terpenuhi dengan pelayanan berupa fasilitas yang diberikan oleh KPU dan apakah memberikan dampak positif bagi mereka, kemudian peluncuran aplikasi berbasis android “SIGUB” apakah sangat bermanfaat dan membantu bagi masyarakat yang kurang memahami adanya Pemilu dan Pilkada dll. KPU Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi satu demi satu program kegiatan sosialisasi jika hasil dari evaluasi kegiatan sosialisasi berhasil maka KPU Provinsi Jawa Tengah akan terus menetapkan program – program tersebut.